

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis RENSTRA Tahun 2013 - 2018 dan Rencana Kinerja Tahunan 2016 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016. Penyusunan LKIP Tahun 2016 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2016.

Dalam upaya merealisasikan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented governance). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2016 sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang disusun secara sistematis dan melembaga sebagai hasil Capaian Kinerja Kegiatan dengan memanfaatkan secara optimal Sumber Daya yang dimiliki, pengetahuan antisipatif, manajemen secara sistematis, efisien, efektif, responsif dan akuntabel, serta mampu mengukur hasil kinerjanya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis, sehingga dapat dicapai sasaran sesuai target capaian yang telah ditetapkan dalam RENSTRA – SKPD Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018. Dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis (RENSTRA), Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang prasarana jalan dengan wewenang menyelenggarakan jalan Provinsi di Jawa Barat, telah berusaha melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Jalan Provinsi. Siklus kinerja dimulai dari perencanaan strategis, yang meliputi proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pada tahap selanjutnya dilaksanakan pengukuran kinerja, evaluasi dan analisa akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang dimuat dalam Penetapan Kinerja.

Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas Dinas Bina Marga, ditetapkan metode pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematis dan bertahap untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan. Pengukuran kinerja tahun 2016 dilaksanakan terhadap kinerja realisasi capaian penetapan kinerja tahun 2016. Pengukuran dilakukan terhadap indikator hasil (outcome).

Hasil realisasi pelaksanaan tugas pada tahun anggaran 2016 Pencapaian Kinerja Tahun 2016 pada Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alat ukur Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

1. Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap dengan capaian sebesar 98,01%.
2. Persentase Tingkat peningkatan aksesibilitas menuju kawasan strategi provinsi dengan capaian sebesar 54,90%
3. Presentase Tingkat pemanfaatan Rumaja, Rumija dan Ruwasja sesuai aturan yang berlaku dengan tingkat capaian sebesar 99,60%

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 disusun dan merupakan gambaran Kinerja yang menyajikan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Bandung, Februari 2017

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN
RUANG PROVINSI JAWA BARAT

Dr. Ir. Drs. H.M. GUNTORO, MM
Pembina Utama
NIP. 19580609 198403 1 007